



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 144/HUMAS PMK/V/2023

*Menko PMK Hadiri Rapat Pleno Perkembangan Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil Presiden

KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menghadiri rapat pleno yang diagendakan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin guna membahas perkembangan pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pada Rabu (24/5) di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Rapat pleno ini merupakan yang ke II setelah terbitnya Inpres pada 8 Juni 2022 lalu.

Muhadjir menerangkan bahwa agenda tersebut merupakan rapat evaluasi terhadap langkah-langkah yang sudah di lakukan dalam penanganan kemiskinan ekstrem sejauh ini. Tidak hanya itu, Muhadjir menjelaskan bahwa telah dibahas juga skenario berikutnya yang akan dilakukan agar pada tahun 2024 angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen.

"Sekarang posisi kita kalau berdasarkan informasi dari BPS per September 2022 angka kemiskinan ekstrem sudah turun menjadi 1,76 persen, tetapi dari Bank Dunia menyampaikan posisi kita 1,5 persen, jadi lebih rendah," ucap Muhadjir.

Muhadjir mengatakan pemerintah akan terus berupaya melakukan berbagai inovasi program dalam rangka mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem. Salah satu yang diungkapkan oleh Muhadjir adalah upaya untuk memotong tahapan untuk mempercepat proses penanganan kemiskinan ekstrem

"Sekarang untuk keluarga miskin ekstrem yang belum mendapatkan BPJS langsung kita data dan datanya tidak perlu ke BPJS Kesehatan, tetapi langsung di handle oleh Kemenko PMK sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden, kita potong, ada short cut untuk penanganan ini," ujar Muhadjir.

Muhadjir turut menerangkan bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah memberikan arahan dan persetujuan agar masyarakat dengan miskin ekstrem dapat memperoleh bantuan multi-program. Nantinya masyarakat akan dapat memperoleh bantuan dari Kemensos berupa PKH atau BPNP, serta bantuan dari dana desa, dan Bansos dari pemerintah daerah, atau bahkan dari CSR sekaligus.

"Nanti setiap masyarakat bisa memperoleh bantuan multi-program sekaligus. Bisa dari Kemensos, dana desa, pemerintah daerah, bahkan juga CSR. Sampai nominalnya sesuai dengan batas kemiskinan ekstrem yaitu 1,9 dollar per hari," ungkap Muhadjir.

Dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga turut memberikan penjelasan bahwa hasil dari pertemuan rapat yang diadakan cukup menggembirakan. Pasalnya upaya penurunan kemiskinan ekstrem telah mendapat pujian dari World Bank. Ma'ruf Amin berharap pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen.

Ma'ruf Amin akan terus mendorong perbaikan data P3KE untuk disempurnakan. Sehingga kantong-kantong kemiskinan dapat terbaca dan dapat langsung ditindaklanjuti untuk diberikan intervensi dan bantuan secara langsung. Ma'ruf Amin juga menerangkan bahwa akan ada penyesuaian anggaran-

anggaran yang tersedia untuk dapat dioptimalkan agar dapat turut digunakan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.

“Oleh karena itu akan ada pergeseran-pergeseran untuk mendukung percepatan penurunan kemiskinan ekstrem ini,” ujar Ma’ruf Amin.

Selain itu, Ma’ruf Amin juga akan lebih mendorong partisipasi pemerintah daerah agar turut serta memperhatikan persoalan tersebut. Menurutnya pada hakikatnya penanganan kemiskinan juga menjadi bagian dari tanggungjawab pemerintah daerah.

Turut hadir dalam rapat kali ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh.

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**